

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Otonomi daerah dipahami sebagai suatu bentuk pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah agar penyelenggaraan urusan pemerintahan dapat diatur dan dikelola secara mandiri. Melalui langkah ini dapat meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan sekaligus mendorong pemerintah lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sebagai bagian dari kebijakan desentralisasi, otonomi daerah ditujukan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat secara menyeluruh. Dalam rangka memperkuat pelaksanaan desentralisasi kewenangan, pemerintah mengimplementasi desentralisasi fiskal melalui pengaturan mekanisme perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, termasuk dalam hubungan keuangan antardaerah (Mardiasmo, 2021). Menurut ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014, otonomi daerah ialah:

“hak, kewenangan, serta tanggung jawab yang dimiliki oleh daerah otonom diartikan sebagai kapasitas yang diberikan untuk mengatur dan mengurus sendiri mandiri berbagai urusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”

Dalam konteks otonomi daerah, pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah diwujudkan oleh pemerintah daerah melalui proses penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Sebagai media informasi utama, laporan keuangan dipahami memiliki peranan penting dalam menunjang pengambilan keputusan ekonomi (Thian, 2022).

Dalam konteks pemerintahan, laporan tersebut digunakan oleh para pemangku kepentingan sebagai pedoman dalam penyajian informasi keuangan. Dengan demikian, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang baik akan berkontribusi dalam peningkatan kegunaan informasi bagi para penggunanya.

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kualitas suatu laporan keuangan dinilai tepenuhinya empat karakteristik utama, yaitu relevan (*relevance*), andal (*reliability*), dapat dibandingkan (*comparability*), serta dapat dipahami (*understandability*). Dalam konteks pemeriksaan keuangan, opini atas kewajaran penyajian informasi dalam laporan keuangan pemerintah diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan berpedoman pada empat kriteria pokok, yakni kepatuhan terhadap SAP, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian internal (www.bpk.go.id). Selanjutnya, proses pemeriksaan tersebut dilakukan untuk menilai kewajaran penyajian informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Merujuk Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024, pemeriksaan terhadap 594 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) telah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan yang disusun oleh seluruh pemerintah daerah pada tahun tersebut. Mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 tentang SAP, penyusunan laporan keuangan oleh pemerintah daerah dilakukan dengan menggunakan basis akrual sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, serta pelaporan transaksi keuangan. Selanjutnya, dalam pemeriksaan atas LKPD Tahun 2024 komponen laporan yang dijadikan

objek pemeriksaan meliputi neraca per 31 Desember 2024, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL). Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), serta Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, termasuk Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Merujuk pada IHPS I Tahun 2024, ditemukan bahwa kualitas LKPD masih dihadapkan pada berbagai permasalahan yang telah diidentifikasi oleh BPK, antara lain kelemahan dalam Sistem Pengendalian Internal, ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, serta kondisi laporan keuangan yang belum sepenuhnya disajikan secara optimal, efisien, dan efektif (www.bpk.go.id).

Salah satu contoh kasus yang mencerminkan kualitas laporan keuangan dapat ditemukan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2024. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 terdapat delapan temuan, kemudian di Kabupaten Bantul Tahun 2024 terdapat 17 temuan, dan di Kota Yogyakarta Tahun 2024 ada delapan temuan, selain itu di kabupaten Gunung Kidul Tahun 2024 terdapat 12 temuan yang perlu ditindaklanjuti. Jika, dibandingkan dengan kabupaten atau kota tersebut Kabupaten Sleman memiliki temuan permasalahan terbanyak pada tahun 2024. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK, terdapat 19 temuan di Kabupaten Sleman Tahun 2024 yang memerlukan tindak lanjut. Pada LKPD, masih ada kelemahan dalam pengendalian internal maupun kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang masih perlu diperhatikan lebih antarlain pada badan keuangan aset daerah tidak melakukan pemeriksaan atas kebenaran

perhitungan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), PPK Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan tidak menyusun daftar rincian pembayaran iuran BPJS Kesehatan menunjukkan PPK kurang cermat, serta adanya kelebihan pembayaran biaya langganan free wifi atas dua titik sebesar Rp 8.391.600. Selain itu, bendahara BOS pada 3 SMP Negeri tidak dapat memperlihatkan bukti pertanggungjawaban Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal masing-masing sebesar Rp 537.943.811 dan Rp 41.867.000 yang tidak sesuai dengan ketentuan, agar lebih optimal dalam melakukan pengawasan, pemantauan dan evaluasi atas penyaluran bantuan sosial serta PPTK agar lebih cermat dalam verifikasi data usulan penerima bansos. Kelemahan dalam proses rekonsiliasi data piutang sehingga terjadi kesalahan pencatatan mutasi piutang PBB-P2 yang diakui oleh Kepala Bidang Penagihan dan Pengembangan, serta terdapat kesalahan pencatatan atas lima aset dalam KIB C sebesar Rp 690.802.800. Masih terdapat kelemahan tidak sesuai dengan ketentuan dan dalam melakukan pengawasan belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini, masih terdapat kelemahan dalam sistem pengendalian internal, kurangnya ketelitian dalam pencatatan, serta ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Hal ini berpengaruh pada menurunnya kualitas laporan keuangan, sehingga informasi yang disajikan menjadi kurang andal dan berpotensi menyesatkan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, rendahnya kualitas laporan keuangan juga dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Oleh karena itu, realisasi belanja yang tidak sesuai ketentuan, dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang belum sepenuhnya memenuhi peraturan yang berlaku (www.bpk.go.id). Penelitian ini penting untuk dilakukan saat ini karena masih

terdapat bukti/temuan yang menunjukkan bahwa masalah dalam penyusunan laporan keuangan belum terselesaikan dengan baik, serta meningkatkan tuntutan akan keterbukaan informasi.

Berdasarkan masalah yang telah diidentifikasi, kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah penerapan Standar Akuntansi Pemerintah. Hal ini menyebabkan masih terjadinya kesalahan dalam pencatatan. Menurut Bastian (2010) tentang SAP ialah prinsip akuntansi yang menjadi dasar dalam pembuatan suatu laporan keuangan pemerintah. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, proses penyusunannya harus sesuai pada SAP yang berlaku sehingga agar tercipta transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP, standar tersebut memuat prinsip-prinsip akuntansi yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. SAP berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan laporan keuangan sehingga informasi mengenai posisi keuangan dan kinerja pemerintah dapat disajikan secara tepat, konsisten, serta dapat dipertanggungjawabkan (Siregar, 2025). Dengan demikian, penerapan SAP memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Selanjutnya, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah juga tergantung pada kemampuan/kompetensi sumber daya manusia yang ada. Kompetensi dimaknai sebagai pengetahuan dan keahlian yang diperlukan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan (Arista dkk., 2023). Dalam organisasi, kompetensi menjadi fondasi

penting untuk mendorong terciptanya kinerja yang produktif dan inovatif, terutama jika setiap pegawai memiliki kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi (Hutapea & Thoha, 2008). Potensi yang dimiliki individu tersebut sangat penting dalam membantu mencapai tujuan-tujuan organisasi (Soetrisno, 2016). Selain itu, kompetensi sumber daya manusia meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, kemampuan, serta sifat-sifat pribadi yang secara langsung memengaruhi hasil kerja yang dihasilkan (Mangkunegara, 2012). Maka itu, kemampuan pegawai dalam menyelesaikan tugas sangat bergantung pada tingkat kemampuan yang pegawai miliki, sehingga dapat membantu mencapai tujuan organisasi, terutama dalam membuat laporan keuangan yang baik.

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah Sistem Pengendalian Internal. SPI mencakup struktur organisasi, metode, serta berbagai prosedur yang saling terintegrasi yang bertujuan untuk melindungi aset organisasi, menjamin ketepatan dan keandalan informasi akuntansi, meningkatkan efisiensi operasional, serta memastikan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen (Mulyadi, 2016). Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), SPI merupakan suatu proses yang berlangsung secara terus-menerus dan dilaksanakan oleh pimpinan beserta seluruh pegawai guna memberikan keyakinan yang cukup dalam pencapaian tujuan organisasi. Tujuan tersebut mencakup aspek efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan kegiatan, keandalan dalam penyusunan laporan keuangan, perlindungan aset negara, serta kesesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masih ada beberapa menunjukkan adanya

kelemahan dalam SPI, misalnya dalam hal pencatatan yang belum akurat, sistem informasi akuntansi, dan pelaporan yang belum didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten, serta keterlambatan dalam penyampaian laporan. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK dalam IHPS 1 Tahun 2024, ditemukan sebanyak 7055 permasalahan atau sekitar 42,7% yang berkaitan dengan kelemahan SPI. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah masih belum mencapai tingkat optimal. Oleh karena itu, penerapan sistem pengendalian internal yang efektif merupakan hal yang sangat penting dalam mendukung fungsi pengawasan dan pengendalian, sehingga mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa bahwa penerapan SAP, kompetensi sumber daya manusia, serta sistem pengendalian internal merupakan faktor-faktor penting dalam menciptakan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang baik. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat dinilai dengan 4 opini yang diberikan oleh BPK yang mencerminkan tingkat kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut.

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menggunakan variabel penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati dkk. (2022) menyatakan bahwa diperoleh hasil kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Yogyakarta. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Bestari &

Wahyuni (2023) diperoleh hasil bahwa kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sedangkan penerapan standar akuntansi pemerintah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Tegal. Selanjutnya, penelitian Nst dkk. (2024) penerapan standar akuntansi pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Sumatra Utara. Hal serupa juga dinyatakan pada penelitian yang dilakukan oleh Rahmiati & Baihaqi (2023) memperoleh hasil kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan di Kaupaten Kepahiang. Penelitian kelima yang dilakukan oleh Hafidzah & Tjahjono (2025) memperoleh hasil bahwa penerapan SAP, sistem pengendalian internal, kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi sumber daya manusia, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Sleman. Peneliti memilih subjek penelitian yang digunakan ialah Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. Karena masih terdapat beberapa kekurangan pada laporan keuangan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, sekalipun sudah memperoleh opini WTP. Terdapat temuan dari BPK RI

Tahun 2024, ditemukan bahwa di Kabupaten Sleman masih ada kelemahan dalam sistem pengendalian internal, kurangnya ketelitian saat mencatat, serta adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan evaluasi dan refleksi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan agar lebih andal dan dapat dipertanggungjawabkan pada periode selanjutnya.

1.2. Rumusan Masalah

Pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Sleman masih terdapat beberapa permasalahan yang masih harus menjadi perhatian antarlain pada badan keuangan aset daerah tidak melakukan pemeriksaan atas kebenaran perhitungan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), PPK Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan tidak menyusun daftar rincian pembayaran iuran BPJS Kesehatan menunjukkan PPK kurang cermat, serta adanya kelebihan pembayaran biaya langganan free wifi atas dua titik sebesar Rp 8.391.600. Selain itu, bendahara BOS pada 3 SMP Negeri tidak dapat memperlihatkan bukti pertanggungjawaban Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal masing-masing sebesar Rp 537.943.811 dan Rp 41.867.000 yang tidak sesuai dengan ketentuan, agar lebih optimal dalam melakukan pengawasan, pemantauan dan evaluasi atas penyaluran bantuan sosial serta PPTK agar lebih cermat dalam verifikasi data usulan penerima bansos. Kelemahan dalam proses rekonsiliasi data piutang sehingga terjadi kesalahan pencatatan mutasi piutang PBB-P2 yang diakui oleh Kepala Bidang Penagihan dan Pengembangan, serta terdapat kesalahan pencatatan atas lima aset dalam KIB C sebesar Rp 690.802.800

Masih terdapat kelemahan dalam sistem pengendalian internal, kurangnya ketelitian dalam pencatatan, serta ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman?
2. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman?
3. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman?

1.3. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang serta identifikasi permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, dan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman maupun penafsiran yang berbeda terhadap penelitian ini, maka diperlukan adanya pembatasan masalah sebagai acuan dalam melakukan penelitian. Penelitian ini difokuskan pada pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman.

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi sumber daya manusia, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman.

1.5. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini mampu memberikan hasil yang berguna, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, memperkuat temuan penelitian sebelumnya serta menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya terkait Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang bernilai berguna sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, serta menjadi masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam upaya penyempurnaan pelaporan keuangan daerah.